

## **Blokade Hormuz Trump dan Jebakan Malaka: Saat Selat Strategis Indonesia Menjadi Arena Perang Dingin Baru yang Tak Terhindarkan**

suryawiranto.id

Blokade Selat Hormuz yang kini telah berlaku efektif sejak 13 April 2026 bukan sekadar pukulan telak bagi pasokan minyak global. Ia adalah katalisator geopolitik yang secara otomatis menggeser pusat gravitasi maritim dunia ke arah timur, tepat ke Selat Malaka, arteri vital yang selama ini menjadi “*dilema Malaka*” bagi Cina dan kini menjadi ujian eksistensial bagi kedaulatan maritim Indonesia. Apa yang terjadi di Teluk Persia kini memaksa Selat Malaka, yang mengangkut 80 persen impor minyak Cina, seperempat perdagangan maritim global, dan sebagian besar energi Asia Timur, untuk menanggung beban *spillover* yang brutal: peningkatan lalu lintas kapal secara dramatis, munculnya armada hantu (*ghost fleet*) tanker yang mematikan sinyal AIS demi menghindari sanksi, serta tekanan internasional yang tak tertahankan bagi Jakarta untuk menjamin “*kebebasan navigasi*” di wilayah yang secara hukum sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Indonesia.

Secara strategis, ini adalah konsekuensi logis dari doktrin Trump yang kasar: dengan merampas kendali Hormuz untuk memaksa Iran, Washington justru mempercepat multipolarisasi *chokepoint* global. Cina, yang terpukul paling parah oleh lonjakan harga minyak di atas 100 dolar AS per barel, tak punya pilihan selain mengalihkan sebagian besar kargonya ke jalur alternatif, dan Malaka adalah yang paling pendek sekaligus paling rentan. Data pelacakan kapal menunjukkan lonjakan aktivitas tanker non-konvensional yang melintas Malaka dalam beberapa hari terakhir, banyak di antaranya berasal dari sumber non-Traditional yang berusaha mem-*bypass* blokade. Akibatnya, risiko kecelakaan laut, pencemaran lingkungan, dan ancaman pembajakan melonjak tajam. Yang lebih berbahaya: peningkatan kehadiran angkatan laut asing, baik AS yang ingin “*mengamankan*” jalur alternatif maupun Cina yang memperkuat armada *escort*-nya, berpotensi mengubah Selat Malaka dari jalur perdagangan menjadi zona *proxy* konflik.

Bagi Indonesia, dampak ini jauh lebih dari sekadar ekonomi. Sebagai negara pantai utama yang menguasai sebagian besar Selat Malaka, kita kini menghadapi paradoks kekuasaan yang pahit: di satu sisi, peningkatan lalu lintas bisa menjadi sumber pendapatan tol laut dan posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi energi; di sisi lain, kita berisiko menjadi pion dalam permainan *great power* yang tak kita kendalikan. Doktrin “*poros maritim dunia*” yang selama ini hanya retorika kini diuji secara nyata. Jika kebebasan navigasi di Hormuz bisa dirampas oleh satu negara adidaya, maka prinsip yang sama, dengan dalih “*keamanan global*”, bisa diterapkan di Malaka kapan saja. Elite Jakarta yang masih terjebak dalam netralitas pasif harus menyadari: Selat Malaka bukan lagi sekadar selat geografis, melainkan instrumen kekuasaan strategis yang menentukan apakah Indonesia akan menjadi subjek atau objek dalam tatanan Indo-Pasifik yang baru.

Implementasi respons yang diperlukan tak boleh setengah-setengah. **Pertama**, percepat penguatan kapabilitas penegakan kedaulatan: tingkatkan patroli terintegrasi TNI AL bersama Malaysia dan Singapura, lengkapi dengan sistem pengawasan maritim berbasis AI dan rudal anti-kapal untuk mencegah “*ghost fleet*” menjadi ancaman keamanan. **Kedua**, manfaatkan posisi ini secara agresif dalam diplomasi:

dorong ASEAN dan IORA untuk merumuskan kode etik *chokepoint* yang inklusif, bukan hegemonik, sambil menegosiasikan skema pengelolaan bersama yang menguntungkan Indonesia sebagai pemilik sah. **Ketiga**, diversifikasi rute energi nasional secara paralel, percepat proyek pipa darat, terminal LNG terapung, dan kerja sama dengan Rusia serta produsen Afrika, agar kita tak lagi bergantung pada satu *chokepoint* pun, baik Hormuz maupun Malaka sendiri.

Dalam perspektif doktoral yang tak kenal ilusi, blokade Hormuz ini mempertegas bahwa era *chokepoint* sebagai senjata telah tiba. *Thucydides Trap* kini tak hanya terjadi di Hormuz; ia mereplikasi diri di Malaka, di mana Cina berusaha keluar dari jebakannya sementara AS berusaha menjaga dominasinya. Indonesia, dengan posisi geografis yang tak tergantikan, memiliki peluang historis untuk menjadi penentu nasib, bukan korban. Namun peluang itu hanya akan terealisasi jika kita berani meninggalkan *complacency* dan membangun *grand strategy* maritim yang visioner: pertahanan yang mandiri, diplomasi yang pragmatis, dan pemanfaatan kedaulatan sebagai *leverage* ekonomi-politik.

Selat Malaka kini bukan lagi sekadar jalur perdagangan. Ia adalah medan pertempuran baru dalam perang dingin energi global. Indonesia sudah tak punya kemewahan untuk berdiri di pinggir. Waktunya memilih: menjadi penjaga gerbang yang tangguh, atau menjadi koridor yang dikuasai orang lain. Pilihannya menentukan masa depan kita sebagai bangsa maritim, atau sekadar catatan kaki dalam sejarah yang ditulis oleh kekuatan besar.